

ISI

Sapa Redaksi

a/n Tim Redaksi - Aminah Idris

Halaman

- 1 Sapa Redaksi
- 2 Berita Organisasi
- 3 Pasukan Rambut Panjang
- 5 Kebaya mencitrakan Perempuan, bagaimana Dengan Laki-laki?
- 8 Kekerasan terhadap Perempuan
- 10 Sunat Kelamin Perempuan
- 13 Sebuah Renungan
- 14 Dirgahayu 8 Maret

Team Redaksi

Aminah Idris
Farida Ishaja
Twie Tjoa
Windrayati

Disain

Public Relation DIAN

Selamat bertemu kembali dengan Sinar DIAN diawal tahun 2015 ini. Kali inipun Sinar DIAN akan menyajikan berita organisasi dari Stichting DIAN, sejarah pahlawan, tinjauan, analisa dan sebagainya.

Sinar DIAN edisi Maret 2015 ini menghadap anda bertepatan dengan peringatan **Hari Solidaritas Perempuan Sedunia** - 8 Maret. Untuk itu, seluruh Pengurus Stichting DIAN menyampaikan *Selamat Berjuang* kepada semua perempuan penggiat usaha penegakan keadilan bagi kehidupan perempuan dimanapun berada.

Dalam rubrik sejarah pahlawan, kali ini kami persembahkan kisah kepahlawanan perempuan Vietnam dalam perang melawan agresor Amerika. Bersama “**Pasukan Rambut Panjang**” anda akan dibawa ikut menghayati peran heroik perempuan Vietnam masa itu.

Saudari Suharti Maslam mengajak kita berkenalan dengan Julia Suryakusuma yang dengan luwes menggunakan gender analisisnya yang tajam dalam artikel “**Kebaya Mencitrakan Perempuan**”. Tahun 2015 adalah tahun yang penuh arti dalam sejarah bangsa Indonesia. Tahun ini tepat 50 tahun dari dimulainya tragedi nasional di Indonesia dengan berkuasanya rezim Orba, yang telah mengorbankan jutaan jiwa rakyat Indonesia sendiri. Politik kekerasan negara yang dibalut fitnah dan rekayasa adalah pelanggaran HAM berat, yang terasa dampaknya hingga kini. Perempuan adalah golongan masyarakat yang paling rawan untuk menjadi sasaran kekerasan dalam bermacam bentuknya.

Artikel “**Kekerasan terhadap Perempuan**”(KtP) menghadapkan anda pada kenyataan dewasa ini yang sangat memprihatinkan.

Kekerasan seksual yang diangkat dalam artikel “**Sunat Kelamin Perempuan**” menunjukkan sekali lagi bentuk pelanggaran HAM Kaum Perempuan. Tahun 2015 juga merupakan tahun harapan. Kepada pemerintah Jokowi-JK dengan 8 menteri perempuannya tertumpu harapan terselesaikannya pelanggaran HAM berat masa lalu dan terhentikannya pelanggaran HAM masa kini. Sajak “**Renungan**” karya saudari Sulistiadewi yang ditulisnya diabad yang lalu masih tetap aktuil sampai sekarang.

Mari kita cermati Sinar DIAN edisi Maret 2015 ini. Selamat membaca dan salam hangat. ■



Berita Organisasi

a/n Pengurus Stichting DIAN – *Farida Ishaja*

Di bawah ini pengurus DIAN melaporkan kegiatan organisasi setelah keluarnya SINAR DIAN edisi 2 Nopember 2014 yang lalu.

Pada tanggal 14 Desember 2014, DIAN telah menyelenggarakan acara Pemutaran film-film Indonesia beserta presentasi dilengkapi dengan foto-foto oleh Twie Tjoa bertema kekerasan seksual terhadap etnis perempuan Tionghoa di Indonesia 1998. Kegiatan ini dilaksanakan dalam kampanye internasional anti kekerasan terhadap perempuan, dengan bekerjasama dengan organisasi perempuan berwarna dan pelarian politik ZAMI dan gerakan WE CAN (end all violence against women) di Belanda, bertempat di gedung VEC (Vrouwen Empowerment Centrum), Amsterdam. Film-film yang diputar: Pertama, “Di belakang senyum mereka” (Behind their smile), film dokumenter yang dibuat oleh Helois Pierre, seorang perempuan Perancis pemerhati isu perempuan di Indonesia tentang gender. Dari situ terkuak bahwa keadilan gender belum ada di Indonesia! Kedua, ‘ Harus !!’, film cerita tentang nasib seorang TKW yang setelah pulang ditulari AIDS oleh suaminya, sampai bayinya meninggal, tapi perempuan ini yang dipersalahkan dan dijauhi oleh instansi, famili, kenalan, masyarakat sekitar, sehingga dia HARUS berbuat sesuatu, bergabung dengan organisasi dan orang-orang yang berjuang untuk hak-hak dan perbaikan nasib perempuan seperti dia.

Selain itu anggota-anggota pengurus DIAN telah menghadiri beberapa kegiatan organisasi sahabat (yang ada kerjasama dengan DIAN) antara lain: Menghadiri peringatan Ulang tahun ke 4 IMWU pada tanggal 3 Januari 2015; menghadiri pemutaran film ‘Minggu pagi di taman Victoria’ film cerita tentang drama kehidupan pekerja migran perempuan Indonesia di Hongkong yang diikuti dengan diskusi dengan sutradara perempuannya, sekaligus artis, Lola Amaria. Lokasi: gedung Institute Social Study Den Haag (diselenggarakan oleh PPI Den Haag, Sastra Pembebasan, IMWU); setelah itu, wakil-wakil DIAN juga menghadiri Pertemuan peluncuran ‘Het F-boek’, yang berisi essay dari lebih 60 penulis tentang bagaimana keadaan feminisme hari ini, dalam rangka hari Perempuan Internasional 8/3 yang diselenggarakan oleh ATRIA, Amsterdam pada 5 Maret 2015 ; Tanggal 8 Maret DIAN turut dalam demonstrasi 8 Maret di Lapangan DAM yang diikuti pawai dan pesta kesenian di Amsterdam.

Dalam kesempatan ini kami juga ingin memberitakan bahwa rencana DIAN untuk mengadakan Forum Diskusi di bulan April 2015 dengan tema Kehidupan Migran Wanita Indonesia di Belanda tetap akan dilangsungkan di Amsterdam. Kegiatan Hari Kesenian yang semula kami rencanakan akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2015, saying sekali terpaksa ditunda karena sempitnya waktu persiapan.

Sekianlah, berita organisasi dari DIAN. ■

Himbauan

Untuk hidup dan aktifnya Stichting DIAN pengurus DIAN mengharapkan sekali bantuan sahabat semua berupa donasi melalui nomor bank: **NL63ABNA0540984043** atas nama **Stichting DIAN**. Terima kasih dan salam hangat dari pengurus DIAN.

Stichting DIAN

Postadres : Beukenhorst 110 - 1112 BJ - Diemen
Email : stichting.dian@gmail.com
Web : <http://stichtingdian.org>
IBAN rekening : NL63ABNA0540984043 - t.n.v. Stichting DIAN



Pasukan Rambut Panjang (Vietnam Selatan)

Farida Ishaja

Pasukan Rambut Panjang (PRP) - Đội quân Tóc dài - adalah kekuatan yang hampir semuanya perempuan yang lahir dari kancah perjuangan rakyat Vietnam Selatan (Vietsel) melawan teror penguasa fasis **Ngô Đình Diệm** yang disokong oleh Amerika Serikat (AS). Pasukan yang menjadi kekuatan induk dari perjuangan massa ini terus bertahan melalui tahap-tahap perjuangan rakyat Vietsel sampai mencapai kemenangan terakhir melawan agresi AS di tahun 1975.



Nguyễn Thị Định
pemimpin staf komando PRP

Hasil-hasil yang dicapai oleh PRP ini tentu tidak terlepas dari peranan pemimpin staf komandonya **Nguyễn Thị Định**, seorang pejuang perempuan yang kemudian menjadi jenderal perempuan yang cakap sampai kemenangan perang Vietnam melawan agresi Amerika Serikat.

Operasi-operasi militer dengan pemboman, penembakan artileri, pembakaran rumah-rumah penduduk, pemerkosaan dan bentuk-bentuk teror lain yang kejam dan berdarah yang dilancarkan oleh kekuasaan *Ngô Đình Diệm* di pedesaan Vietsel sejak berkuasanya (1954) sampai tahun 1959 yang maksudnya untuk menghentikan

perjuangan rakyat Vietsel dalam menuntut hak hidup yang layak, melawan perampokan tanah petani, menuntut pelaksanaan *Perjanjian Jenewa* tentang Vietnam (1954) terutama tentang pemilihan umum penyatuan negeri dan menuntut keadilan; tuntutan ini semua sifatnya legal. Teror yang menjadi-jadi (yang sampai dijuluki penduduk bahwa kekuasaan Ngo telah menyeret mesin penggal kemana-mana) telah mengakibatkan timbulnya 'Kebangkitan Serempak' (Dong Khoi) bulan Januari 1960 di kabupaten *Mỏ Cày*, provinsi *Bến Tre*. Tiga kecamatan membebaskan diri. Segera rezim *Ngô Đình Diệm* yang disokong AS melakukan operasi militer dan penindasan berdarah yang luar biasa kejam terhadap 3 kecamatan tersebut. Massa yang terorganisir yakin bahwa bentuk perjuangan legal harus ditingkatkan. Karena itulah lahir *Pasukan Rambut Panjang* yang intinya adalah perempuan-perempuan muda yang gigih dan antusias serta sejumlah perempuan tua yang mantap dan berpengalaman dalam memimpin aksi perjuangan massa.

PRP diorganisasi secara ketat. Ia mempunyai *Staf Komando*; anggotanya dipilih. Pembagian tugasnya jelas. Ada kekuatan perintis, kekuatan untuk maju (menyerang); ada kekuatan yang bertugas di garis belakang (a.l. menjaga rumah, mengurus anak-anak, binatang peliharaan dan ternak, mengatasi kalau ada pemboman atau serangan artileri; ada bagian kesehatan, pertolongan pertama pada kecelakaan dsbnya. Perempuan-perempuan yang pergi berjuang ke kota biasanya diantar ke luar kampung/desa dan kalau kembali dijemput dan disambut. Dengan pengorganisasian yang rapi itu massa yang pergi berjuang selalu tenang meninggalkan kampung, anak-anak dan rumahnya dan antusias serta lega kalau kembali.



Stichting DIAN

Postadres : Beukenhorst 110 - 1112 BJ - Diemen
Email : stichting.dian@gmail.com
Web : <http://stichtingdian.org>
IBAN rekening : NL63ABNA0540984043 - t.n.v. Stichting DIAN

PRP tetap bertahan dalam tahap-tahap perjuangan rakyat Vietsel. Ada 5 tahap revolusi pembebasan Vietsel dengan metode dan bentuk-bentuk perjuangan yang disesuaikan dengan ciri-ciri khas tiap tahap. Mengenai perjuangan politik tahap pertama sudah dijelaskan diatas yaitu tahap perjuangan politik massa dalam masa teror *Ngô Đình Diệm* yang kemudian dipadukan dengan perjuangan bersenjata dan menggerakkan serdadu musuh. Tahap ke-2 yaitu perjuangan politik dalam *Perang Istimewa AS*. Metode 'dua kaki' (pemaduan bersenjata dan politik) dan 3 ujung tombak serangan (aksi politik massa, aksi bersenjata dan aksi menggerakkan/berpropaganda di kalangan serdadu musuh) terus dilanjutkan dengan tujuan menggagalkan strategi AS yang diberi nama '**Rencana Stanley - Taylor**' yang bermaksud mempasifikasi Vietsel dalam waktu 18 bulan. Caranya dengan menggiring jutaan petani Vietsel ke dalam kampung/desa strategis yang dikelilingi pagar kawat berduri dan di luar daerah itu, di daerah yang tak bisa dikontrol dilakukan pemboman dan penebaran racun kimia. Perjuangan yang sengit melawan pengekangan desa strategi akhirnya berhasil. Massa di luar desa strategi telah bertahan di tempat masing-masing secara terpecah dan dalam jumlah besar dan terus menerus bergerak mendatangi komandan



Pasukan Rambut Panjang (Vietnam Selatan)

tentara musuh atau penguasa dengan membawa kepingan bom AS, korban-korban perang, manusia, ternak, potongan patung Budha dll. untuk membelegiti kekejaman musuh. Pada tahun 1964 '**Rencana Stanley - Taylor**' mengalami kebangkrutan. 17.000 desa strategi sudah hancur berantakan. Perjuangan politik dengan PRP sebagai kekuatan induknya memasuki tahap ke-3 yaitu periode '*perang lokal*' di mana AS menggunakan strategi memasukkan langsung pasukan tempurnya di Vietsel. PRP dengan kekuatan massa telah mendapatkan cara untuk berjuang mematahkan intrik-intrik dan serangan pasukan asing (AS dan pembantu-pembantunya). Semua ini masih dengan metode 'dua kaki, 3 ujung tombak serangan'. Berkembangnya PRP dan kekuatan massa di kota-kota besar Vietsel terutama di **Sài Gòn** (nama sekarang: **Hồ Chí Minh City**) telah memberi dampak positif bagi perjuangan tahap ke-4 yaitu periode **Operasi Musim Semi 1968** dan tahap terakhir yaitu periode **Operasi Hồ Chí Minh 1975**.

Pelaksanaan perjuangan politik oleh massa rakyat Vietsel dengan intinya PRP yang dilakukan secara telaten dan berjangka panjang yang dikombinasikan dengan kegiatan di kalangan serdadu/kekuatan musuh dan dengan perjuangan bersenjata telah menunjukkan hasilnya dalam periode pembebasan Vietsel. Kota-kota dengan gedung-gedung dan bangunan lainnya bisa dibebaskan dan tetap utuh! Berhasilnya perjuangan rakyat Vietsel mengalahkan perang agresi AS tidak terlepas dari andil perempuan Vietnam Selatan dengan Pasukan Rambut Panjangnya!! ■



Kebaya mencitrakan Perempuan, bagaimana dengan Laki-laki ? *

Julia Suryakusuma

Kebaya sebagai Identitas, Ekspresi dan Opresi

Pakaian berperan besar dalam menentukan citra seseorang. Namun lebih dari itu, pakaian juga cermin, status, hierarki dan gender; memiliki nilai simbolik dan merupakan ekspresi cara hidup tertentu. Pakaian mencerminkan sejarah, hubungan kekuasaan, serta perbedaan dalam pandangan sosial, politik dan agama.

Semua ini terkandung dalam kain kebaya, yang dipromosikan sebagai pakaian nasional bagi perempuan. Bagi laki-laki, pakaian nasional yang dipilih adalah stelan jas Barat, yang membuat kita bertanya, mengapa?

Hal ini mungkin disebabkan stelan jas Barat adalah kostum para pemimpin kolonial yang sangat berkuasa secara politis. Dapat dipahami, kostum inilah yang dipakai para *inlander* yang ingin meniru para penindas mereka ketika mereka mendapatkan secuil pendidikan Barat. Ketika kemerdekaan nasional tercapai, stelan jas Barat memberikan kesan modernisasi dan tempat yang layak disamping negara-negara kolonial Eropa yang besar. Stelan jas Barat mengaitkannya dengan kewarganegaraan dan representasi politik; sejarahnya di Jawa mengaitkannya dengan kekuasaan dan kemampuan menggunakan kekuasaan tersebut. Pada masa penjajahan Belanda, pemakai kain kebaya yang tampil di panggung publik hanyalah mereka yang ditempatkan dalam peran isteri. Sedangkan di kalangan kelas bawah, perempuan yang mengenakan kain kebaya adalah petani atau pembantu. Perempuan yang mempunyai identitas sendiri, yang telah mengecap pendidikan Barat dan mempunyai pekerjaan modern, mengenakan pakaian Barat. Dengan demikian identifikasi kain kebaya sebagai pakaian nasional mengisyaratkan beberapa hal, yang perlu dicatat, sangat kontradiktif.



Kebaya mendefinisikan perempuan sebagai isteri yang tunduk pada suami. Gagasan ketergantungan perempuan ini terjelma dengan apik sekali dalam *Dharma Wanita* yang juga dirasuki ciri-ciri feodal dan militeristik. Meski didirikan tahun 1974 dan merupakan produk *Orde Baru*, namun *Dharma Wanita* masih mampu bertahan hingga jaman Reformasi kini. Saya masih mengingat dengan jelas sekali, ketika masih kanak-kanak, bagaimana ibu saya, isteri seorang diplomat (dan dengan demikian, otomatis anggota

Dharma Wanita) harus mengenakan kain kebaya untuk menghadiri rangkaian resmi diplomatik yang harus dihadiri olehnya dan ayah saya. Namun saat yang paling merepotkannya adalah pada acara perayaan



17 Agustus, setelah ia dan ibu-ibu lainnya bekerja berhari-hari memasak beratus-ratus tusuk sate, bergalon-galon soto, berbukit-bukit gado-gado dan berbagai masakan 'nasional' lainnya. Pada hari itu, mereka semua harus menampilkan diri secantik mungkin dengan kain kebaya, tersenyum semanis-manisnya kepada semua para tamu terhormat. Padahal sejujur tubuh, kaki dan tangan mereka begitu pegal dan letih setelah bekerja berhari-hari di dapur melakukan pekerjaan domestik yang tidak dihargai. Padahal negara tergantung padanya, tetapi para isteri tidak pernah dibayar untuk itu. Mengapa mereka harus dibayar bila suami-suami mereka toh sudah menjadi pencari nafkah keluarga?

Selain itu, pemakaian kain kebaya, setidaknya seperti yang dikenakan ibu saya dan kebanyakan perempuan elit, bersifat sangat membatasi. Memang di mana-mana pakaian perempuan ditentukan konstruksi sosial femininitas. Dalam banyak budaya, baik yang baru maupun yang lama, kain kebaya seringkali berarti pakaian yang menghambat gerakan, sekaligus mengekspos dan menonjolkan lekuk-lekuk bentuk tubuh perempuan. Si pemakai kain kebaya cenderung berjalan tertatih-tatih tanpa dapat melakukan gerakan cepat atau tangkas. Meski ibu saya memang amat cantik ketika mengenakan kebaya, dalam perannya sebagai isteri diplomat, saya lebih senang jika ia menjadi dirinya dan yang paling penting, menjadi ibu yang menyayangi saya.

Kain kebaya mungkin merupakan pakaian buat semua perempuan, tetapi ini tidak berarti kain kebaya dapat meniadakan perbedaan kelas sosial. Sejak jaman kolonial, kain kebaya justru membedakan perempuan dari berbagai kalangan. Perempuan Belanda pun mengenakan kain kebaya, dengan motif-motif berbeda dari yang dipakai perempuan Jawa. Secara historis kaum ningrat mengenakan batik tulis, dengan kebaya dari sutera, beludru atau brokat. Kalangan biasa mengenakan batik dan kebaya buatan pabrik. Berbagai variasi subtil inilah yang membedakan perempuan ke dalam kotak-kotak sosial yang sudah baku, yang memberikan kelompok etnis, pekerjaan dan status sosial laki-laki yang menjadi bapak atau suami mereka.

Bila dalam era revolusi kain kebaya merupakan lambang identitas pribumi, dalam era Sukarno kain kebaya terkait dengan identitas nasional.

Pada 1980an, ketika puncak kekuasaan Orde Baru, terdapat tren pakaian seragam—kemungkinan besar sebagai cermin militerisasi, penyeragaman, serta pengontrolan masyarakat Indonesia oleh negara. Baik pegawai negeri lelaki maupun perempuan mengenakan seragam biru, sedang para ibu-ibu *Dharma Wanita* mengenakan stelan merahmuda-jingga, atau kebaya dengan warna yang sama dipadukan dengan



kain batik yang juga seragam motifnya. Yang lucu, tren ini juga lantas ditiru oleh masyarakat luas. Di resepsi perkawinan misalnya, bukan hanya pagar ayu dan pagar bagus yang memakai seragam, tetapi juga semua keluarga yang menjadi panitia, dan juga orang tua pengantin. Ini merupakan perkembangan aneh, karena di jaman penjajahan, seragam adalah cara membedakan diri dari staf catering dan para pembantu rumah tangga yang tentunya mempunyai status sosial lebih rendah. Pada akhirnya seragam berfungsi meniadakan identitas individu yang digantikan dengan identitas kolektif. Hal ini dapat erat dikaitkan dengan rezim *Orde Baru* Soeharto serta penekanannya yang kuat terhadap monoloyalitas serta kontrol sosial.



Kain kebaya kini juga menjadi populer di kalangan aktifis perempuan yang mempunyai pendidikan serta kesadaran sosial lebih tinggi. Mereka mengenakan versi lebih santai dari kain kebaya, tanpa korset, dengan sekadar mengikat kain di pinggang, dan mengenakannya dengan blus atau bahkan dengan kaos oblong, selain blus kebaya. Alasannya adalah estetika dan kepraktisan. Para aktifis perempuan ini menganggap kostum ini juga praktis karena memudahkan beralih langsung dari kantor ke resepsi. Tak kalah pentingnya adalah identitas pribadi. Rupanya kain kebaya memberikan alternatif pribumi yang feminin dan atraktif terhadap pakaian kantor perempuan ala Barat.

Jelas, meski dirasuki berbagai kontradiksi serta makna yang ambigu, kebaya tetap bertahan. Apa makna sosial dan politiknya di masa depan, kita belum tahu. Namun, mudah-mudahan, para perempuan pemakai kebaya lah yang akan menentukan hal ini. ■

“Unduhan ini tidak utuh dimuat, berhubung keterbatasan ruangan halaman.”

Pengunduh

Titiek Maslam

Stichting DIAN

Postadres : Beukenhorst 110 - 1112 BJ - Diemen

Email : stichting.dian@gmail.com

Web : <http://stichtingdian.org>

IBAN rekening : NL63ABNA0540984043 - t.n.v. Stichting DIAN



Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP)

Aminah Idris

Menurut mantan *Ketua Komnas Perempuan- Yuniati Chuzaifah*, kekerasan terhadap perempuan atau biasa disingkat menjadi KtP di Indonesia masih tinggi. Rata-rata setiap hari ada 35 perempuan mengalami kekerasan (data tanggal 15/10/2014). Untuk menangani KtP itu, menteri *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* mengeluarkan peraturan No. 1 th 2010 yang mengatur agar setiap kabupaten/kota harus menyiapkan minimal 2 puskesmas *Pusat Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan (PPKtP)*. Kekerasan terjadi di mana-mana, di daerah konflik, di ranah publik, di tempat kerja, di rumahtangga dan sebagainya. Sebagai hasil dari perjuangan yang gigih, sesungguhnya Indonesia sudah mengesahkan Undang-undang anti *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yaitu UU No 23 tahun 2004 (UU KDRT).

Meskipun begitu, kekerasan dalam rumah-tangga masih saja terjadi. Kekerasan sering dipicu oleh penggunaan minuman keras, rasa lebih pada jiwa laki-laki akibat salah pola didik pada anak laki-laki, kerap menjadi sebab tindak kekerasan kepada perempuan yang dianggapnya rendah.

KtP juga banyak disebabkan oleh kebijakan diskriminatif dari pemerintah, baik pusat, daerah atau lembaga-lembaga maupun ketidak adanya perlindungan hukum.

Didalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perempuan diizinkan kawin sesudah mencapai umur 16 tahun. Dalam usia 16 tahun, anak perempuan belum sempat menikmati pendidikan sekolah yang cukup untuk bisa mempersiapkan diri untuk mandiri secara ekonomis. Hal ini menyebabkan ketergantungan mereka pada suami dan rawan kekerasan. Dari segi lain, menurut Perpres No 18 tahun 2014 tentang perlindungan anak tertera bahwa: anak adalah seseorang dibawah umur 18 tahun, karena belum matang psikis maupun biologis. Kawin dini (kurang dari umur 18 tahun) masih banyak terjadi di Indonesia. Selain fasilitas kesehatan yang belum mencukupi, kawin dini merupakan salah satu sebab tingginya angka kematian ibu (359 kematian ibu dari 100000 kelahiran). Masih dalam perjuangan agar batas umur minimal perempuan untuk diizinkan kawin adalah 20 atau 21.

Aturan diskriminatif beralasan moralitas telah disoroti media dalam dan luar negeri. Belum lama ini koran di Indonesiaewartakan adanya peraturan diskriminatif yang mewajibkan perempuan yang melamar di kepolisian untuk melakukan test keperawanan yang biasa disebut test dua jari. Mereka yang tidak lulus test tersebut tidak diterima bekerja di kepolisian. Berita yang sangat menampar kita disebarkan oleh surat kabar di Swedia tanggal 10/2/2015 yang memberitakan juga keharusan test keperawanan untuk gadis-gadis di kota Jember, Jawa Timur. Kepada mereka harus melalui test keperawanan untuk mendapat nilai ijazah. Murid yang selaput daranya tidak utuh, dikeluarkan dari



Stichting DIAN

Postadres : Beukenhorst 110 - 1112 BJ - Diemen
Email : stichting.dian@gmail.com
Web : <http://stichtingdian.org>
IBAN rekening : NL63ABNA0540984043 - t.n.v. Stichting DIAN

sekolah. Tahun 2013 pernah ada proposal untuk dilaksanakan test dua jari tersebut di Sumatra Selatan, tapi karena adanya perlawanan yang kuat, akhirnya berhasil digagalkan.

Pekerjaan sebagai *Pembantu Rumah Tangga* (PRT) sebagian besar dikerjakan oleh perempuan, baik di dalam maupun di luar negeri. Sesungguhnya Konvensi ILO 189 tentang Kerja layak bagi PRT sudah mengatur standar regulasi yang menjamin PRT. Misalnya tentang jam kerja, upah, libur, hak jaminan kesehatan, keselamatan kerja dan sebagainya. Sayangnya sampai sekarang Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut. Penganiayaan terhadap PRT masih saja terjadi (28/2/2015).

Tuntutan yang gencar untuk pengesahan Rencana Undang Undang Perlindungan PRT justru mendapat jawaban dari Menteri Tenaga Kerja dengan keluarnya Peraturan Menteri tenaga Kerja No 2 tahun 2015 yang mmengembalikan sepenuhnya pada hubungan PRT dengan pemberi kerja.

Undang-undang PPTKILN No 39/2014 yang menyulitkan TKI (termasuk TKWnya) masih diberlakukan. Menurut data tahun 2013 tercatat 279760 kasus KtP diseluruh Indonesia dan dari jumlah itu ada 5629 kekerasan seksual. Koran tertanggal 28/2/2015 memberitakan lagi kasus kekerasan seksual terhadap seorang gadis berumur 14 tahun di Palembang.

Ada 15 jenis kekerasan seksual

1	perkosaan	2	intimidasi seksual termasuk ancaman/percobaan perkosaan
3	pelecehan seksual	4	exploitasi seksual
5	perdagangan perempuan untuk tujuan seksual	6	prostitusi paksa
7	perbudakan seksual	8	pemaksaan perkawinan
9	pemaksaan kehamilan	10	pemaksaan aborsi
11	pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi	12	penyiksaan seksual
13	penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual	14	praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan /mendiskriminasikan perempuan
15	kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatis beralasan moralitas dan agama.		

Perempuan korban tragedi nasional '65 dan korban kekerasan terhadap etnis Tionghoa tahun 1998, selain terkena kekerasan seksual seperti perkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan seksual juga peaniayaan fisik, perampasan harta dan nama baik mereka.

Kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu tersebut sampai kini masih belum terselesaikan. Sampai sekarang masih ada stigma negatif terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa 1965.

Dalam kampanye anti kekerasan terhadap perempuan tahun yang lalu dicanangkan untuk :

Kenali Kekerasan terhadap Perempuan dan tangani!

Jangan tolerir Kekerasan terhadap Perempuan, karena Kekerasan terhadap Perempuan adalah bagian dari pelanggaran HAM. ■



Sunatan Kelamin Perempuan (SKP)

Revina Rachmat

Apa itu Sunatan Kelamin Perempuan (SKP) ?

Sunat Kelamin Perempuan (SKP) atau Pemotongan *Kelamin Perempuan* (PKP) adalah praktek *budaya* dimana sebagian atau seluruhnya kelamin perempuan external dibuang.

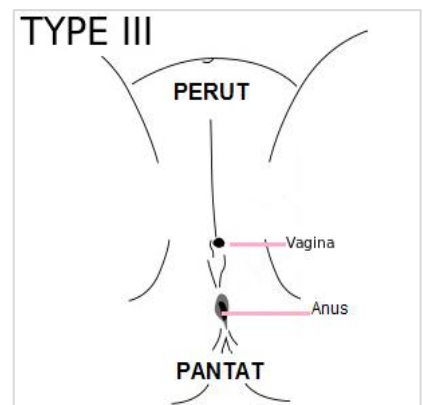
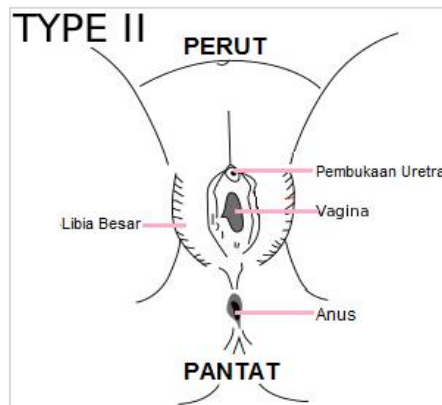
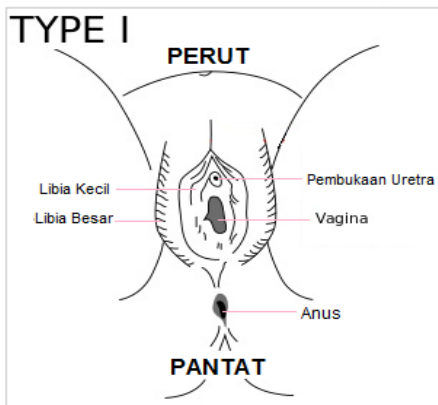


Ada beberapa bentuk Sunat Kelamin Perempuan (SKP)

I. Bentuk minor SKP itu adalah membuang *kulit khatan* (kulup) dan memotong sebagian atau seluruh *Kitoris*.

II. Di samping memotong *Kitoris*, bentuk ini juga membuang sebagian atau seluruh dari *Libia Kecil*

III. Ini adalah bentuk yang paling parah dimana alat kelamin (*Kitoris & Libia Kecil*) dibuang dan *Libia Besar* dijahit menutup pembukaan uretra dan vagina sampai hampir tertutup semua, cuma tinggal lubang kecil saja untuk buang air kencing dan darah menstruasi.



Dalam bahasa Inggris SKP dikenal sebagai **Female Genital Cutting (FGC)** atau **Female Circumcision** dan juga **Female Genital Mutilation (FGM)**.

Apakah SKP terkait dengan agama ?

Meskipun banyak orang kira bahwa Sunatan Kelamin Perempuan (SKP) terkait dengan agama Islam, tapi itu tidak betul. Praktek SKP melintasi batas agama, terutama di Afrika-Timur dan Sahara Selatan. Muslim, Kristen, dan Yahudi telah dikenal untuk melakukan SKP pada gadis-gadis mereka.

Sunatan Kelamin Perempuan (SKP) sebetulnya tidak didukung oleh agama apapun dan bahkan disalahkan oleh banyak pemimpin agama. Juga tidak ada teks agama yang mendukung atau mengharuskan pemotongan kelamin perempuan. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan SKP tidak konsisten. Meskipun teks agama tidak mendukung SKP, tetapi cukup banyak penduduk tetap berpendapat bahwa SKP berkaitan dengan ajaran agama dan tetap mendukung dan mempraktekkan hal ini.

Stichting DIAN

Postadres : Beukenhorst 110 - 1112 BJ - Diemen
 Email : stichting.dian@gmail.com
 Web : <http://stichtingdian.org>
 IBAN rekening : NL63ABNA0540984043 - t.n.v. Stichting DIAN

Mengapa SKP dipraktekkan ?

Sunatan Kelamin Perempuan (SKP) sebetulnya dipraktekkan dari segi sosial, ekonomi atau politik. Yang mendukung SKP percaya bahwa hal ini akan memberdayakan anak perempuan mereka, memastikan anak gadis itu akan menikah dan melindungi nama baik keluarga. Suku seperti Masai malah percaya bahwa dengan SKP, perilaku seksual seorang gadis bisa dibatasi dalam pertumbuhan kedewasaannya untuk menjaga keperawanan wanita.

Walaupun tidak tersangkut dari agama, toh banyak yang percaya bahwa untuk menjadikan putrinya seorang yang beriman baik, orang tua harus melakukan SKP kepada putrinya.

Juga banyak yang percaya takhyul tentang SKP, seperti:

- ❖ Klitoris akan semakin tumbuh kalau seorang gadis tambah umur, karena itu harus dipotong
- ❖ Genitalia luar tidak bersih dan karena itu akan menyebabkan kematian bayi pada waktu melahirkan.

Walaupun orang tua yang mendukung SKP terlihatnya sangat kejam terhadap anak gadisnya, tetapi sebetulnya ini disebabkan oleh kekhawatiran mereka terhadap prospek perkawinan anak putri mereka di hari depan. Orang-orang tua ini malah melihat hal ini sebagai asuhan kewajiban mereka dalam mengasuh seorang gadis.

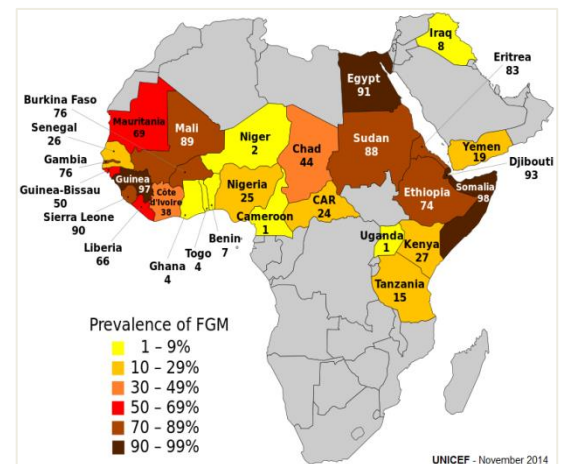
Dimana SKP dipraktekkan?

Sunatan Kelamin Perempuan (SKP) adalah tradisi budaya yang dilakukan di Afrika Tengah, Sahara Selatan, dan di bagian Timur Tengah.

Pada jumlah yang lebih rendah SKP juga dipraktekkan di Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan India.

Beberapa imigran dari negeri-negeri tersebut juga melakukan ini di bagian dunia di mana mereka pergi, termasuk Australia, Kanada, Selandia Baru, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

Menurut penelitian *Demographic & Health Survey (DHS)*, sebagian besar dari wanita yang mengalami SKP tinggal di salah satu dari 28 negara di Afrika dan Timur Tengah di mana ini dipraktekkan. Penelitian menunjukkan bahwa hampir setengah dari jumlah perempuan yang mengalami SKP tinggal di Mesir atau Ethiopia. Untungnya DHS melihat bahwa praktek SKP di Mesir sejak tahun 2008 terus menurun.



Kapan SKP dipraktekkan?

Sunatan Kelamin Perempuan (SKP) dilakukan pada bayi, anak-anak, atau perempuan dari segala usia. Usia kapan anak perempuan dipotong kelaminnya tergantung masing-masing negara, dan bahkan di dalam negara itu sendiri juga tidak sama. Biasanya, SKP dilakukan sebelum seorang gadis mencapai pubertas, yaitu sebelum dia haid (menstruasi). Kadang-kadang hal ini malah dilakukan sebelum seorang wanita menikah atau selama kehamilan pertama dia. Di Mesir, sekitar 90% anak perempuan disunat antara 5 dan 14 tahun. Tetapi di Yaman, lebih dari 75% anak perempuan sudah disunat sebelum mereka berusia 2 minggu.

Stichting DIAN

Postadres : Beukenhorst 110 - 1112 BJ - Diemen

Email : stichting.dian@gmail.com

Web : <http://stichtingdian.org>

IBAN rekening : NL63ABNA0540984043 - t.n.v. Stichting DIAN



Akhir-akhir ini, para peneliti menemui gejala yang mengkhawatirkan, yaitu rata-rata, usia anak perempuan yang mendapat SKP semakin merendah. Kesimpulan para peneliti adalah kalau semakin muda usia gadis-gadis ini, lebih mudah disembunyikan perlakuan ini di negara-negara di mana (sudah) ada hukum melawan SKP. Selain itu, semangkin muda seorang anak, lebih tidak mampu anak ini menolak. Diperkirakan bahwa sekarang ada sekitar 100 sampai 140 juta anak perempuan dan wanita di seluruh dunia mengalami SKP dan setiap tahun lebih dari 3 juta anak perempuan tetap berisiko akan mendapat SKP walaupun banyak kampanye telah diselenggarakan.

Siapa yang praktekkan SKP ?

Sunatan Kelamin Perempuan (SKP) dilakukan oleh macam-macam kategori orang.

Biasanya oleh penyunatan profesional, perempuan yang berreputasi tinggi di lingkungan mereka sendiri atau bidan tradisional. Kadang-kadang oleh penyembuh tradisional, tukang cukur, tetapi juga oleh perawat atau dokter kedokteran Barat.

Tergantung daerahnya, prosedur ini biasanya dilakukan tanpa anestesi dan dalam keadaan higienis yang sangat buruk. Antara lain pisau, gunting, pisau cukur atau potongan pecahan kaca bisa digunakan sebagai instrument SKP.

Apa masalah kesehatan yang disebabkan oleh sunat kelamin perempuan (SKP) ?

Sunatan Kelamin Perempuan (SKP) menyebabkan masalah kesehatan jangka pendek dan juga jangka panjang. Masalahnya tergantung dari bentuk pemotongan, kebersihan alat yang digunakan untuk melakukan pemotongan dan juga kesehatan gadis atau wanita yang menerima pemotongan itu sendiri. Meskipun SKP dilakukan oleh seseorang ahli kesehatan yang profesional, tetapi hampir semua gadis/wanita yang dapat SKP mengalami rasa sakit atau pendarahan yang berat.

Masalah Kesehatan

Jangka Pendek

Perdarahan/Pendarahan yang bisa menyebabkan mati kalau parah

Infeksi yang bisa menjadi abses dan sepsis (infeksi darah)

Rasa sakit pada waktu buang air kencing karena kena luka

Trauma karena selama prosedur dapat tekanan fisik dan psikologis (kalau tidak dapat anestesi)

Jangka Panjang (biasanya type yg. paling parah)

Sulit ke belakang - cuma ada lubang kecil sekali untuk buang air kencing dan menstruasi

Tidak bisa melakukan seks secara normal - bekas luka atau abses yang menutup sebagian vagina membuat seks sangat menyakitkan

Masalah kesehatan ginekologi; misalnya:

- tidak semua darah menstruasi bisa keluar
- alat-alat ginekologi untuk pemeriksaan sulit atau tidak bisa dipakai

Risiko penyakit penularan seksual tinggi; misalnya: HIV atau Hepatitis

Problem bisa hamil - terkait dengan kemampuan hubungan seksual karena bekas luka yang menutup vagina

Pada waktu hamil pendarahan berat dan infeksi bisa menyebabkan kadaan berbahaya untuk bayi dan ibu.

Kelahiran biasanya harus dilakukan dengan seksio sesarea

Stres psikologis dan emosional; misalnya : tidak bisa tidur - kegelisahan - depresi

Stichting DIAN

Postadres : Beukenhorst 110 - 1112 BJ - Diemen

Email : stichting.dian@gmail.com

Web : <http://stichtingdian.org>

IBAN rekening : NL63ABNA0540984043 - t.n.v. Stichting DIAN

Apa isu Hak Azazi Manusia (HAM) tentang SKP ?

Organisasi Kesehatan Internasional, misalnya *World Health Organisation* (WHO) dan *United Nations* (UN) *Commission on Human Rights* berpendapat bahwa perubahan cuma bisa dicapai dengan dukungan dan kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat dimana ada dampak Sunatan Kelamin Perempuan (SKP).

Mereka telah bekerja sama dengan negeri-negeri Afrika dan Asia untuk mencari cara mengakhiri praktek SKP. Bentuk-bentuk yang menurut organisasi-organisasi itu paling baik diterapkan yaitu :

- ❖ **Pertemuan-pertemuan** di masyarakat di mana peranan tokoh-tokoh agama sangat penting
- ❖ **Pendidikan** yang menunjukkan dari segi kesehatan dan juga agama ketidakbenaran hal ini
- ❖ **Kampanye sederhana** di lokasi-lokasi kesehatan dalam bentuk pamflet atau konsultasi
- ❖ **Ritual Tiruan** yang menggantikan upacara ritual yang sulit betul dilepas
- ❖ **Peraturan Hukum** yang lebih berat diterapkan kepada mereka yang mempraktekkan SKP

Sayangnya karena kekacauan ekonomi dan politik dalam sebagian besar dari negeri-negeri yang terlibat dengan SKP, langkah-langkah ini terlalu sedikit atau belum bisa diterapkan dengan baik. ■

Sumber: *womenhealth.gov*

Sebuah Renungan

Sulistiyadewi

Kadang aku hanyut dalam renungan
beribu telah jadi korban
hanya karena rindukan keadilan

Kadang aku tenggelam dalam kedendaman
manusia tamak haus darah pekerja Nusantara
bumi Pertiwi jadi gersang untuk kita
kita terdampar diseberang Persada
kita membawa misi sejarah
tak ada tugas yang lebih mulia
dari menjunjung tinggi tugas-tugas kemanusiaan

Mari!
tetapkan hati, satukan langkah, lawan ketidak adilan
demi Indonesia Baru yang lebih manusiawi

Moscow - bersama hadirnya "Ide Persatuan"

8 Maret - Hari Perempuan Internasional

Revina Rachmat



8 Maret adalah **Hari Perempuan Internasional** yang menunjukkan rasa perjuangan dan solidaritas antara semua perempuan di seluruh dunia, biasanya setiap tahun didasarkan atas topik tertentu.

Sejarah Pendek

Pemogokan pertama oleh wanita terjadi pada **8 Maret 1908** di New York (Amerika Serikat). Pemogokan ini ditujukan terhadap kondisi kerja yang buruk di industri tekstil. Inilah awalnya perjuangan emansipasi wanita dan melawan diskriminasi terhadap perempuan.

Pada tahun **1911**, seorang sosialis Jerman, **Clara Zetkin**, mengusulkan di Konferensi Perempuan Sosialis di Kopenhagen (Denmark) menjadikan tanggal 8 Maret sebagai *Hari Perempuan Internasional*.

Dengan terjadinya lagi pemogokan melawan kondisi kerja yang buruk di industri tekstil pada tanggal **8 Maret 1917**, tetapi kali ini di Petrograd/Saint-Petersburg (Russia) di bawah pimpinan **Alesandra Kollontaj**, tanggal ini definitif dan resmi dijadikan *Hari Perempuan Internasional* pada tahun **1921** oleh *Sekretariat Perempuan Komunis Internasional (Internasional Ketiga)*. ■

Stichting DIAN

Postadres : Beukenhorst 110 - 1112 BJ - Diemen
Email : stichting.dian@gmail.com
Web : <http://stichtingdian.org>
IBAN rekening : NL63ABNA0540984043 - t.n.v. Stichting DIAN